

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DESA TEKULAI HULU KECAMATAN TANAH MERAH

ASMARITA¹

Universitas Islam Indragiri

Email: asmarita020192@gmail.com

ROSLIANA²

Universitas Islam Indragiri

Email: R.rosliana@gmail.com

NOVRANI SUSANTI³

Universitas Islam Indragiri

Email: novrianisusanti95@gmail.com

RIA FEBRINA⁴

Universitas Islam Indragiri

Email: ria06febrina@gmail.com

ABSTRACT

Financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) plays a crucial role in ensuring business sustainability and enhancing community welfare at the village level. Sound financial management is required to uphold the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency so that BUMDes can operate optimally. However, in practice, various challenges remain, including limited human resource capacity, simple financial recording systems, and the incomplete implementation of applicable accounting standards. This study aims to describe and analyze the financial management practices of BUMDes in Tekulai Hulu Village, Tanah Merah District. A qualitative descriptive approach was employed in this research. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving BUMDes administrators and village government officials. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that financial management at BUMDes Tekulai Hulu has been implemented through the stages of planning, implementation, recording, and financial reporting. Nevertheless, these practices have not fully met the principles of transparency and accountability and are not yet fully aligned with prevailing accounting standards. The main obstacles identified include limited accounting knowledge among administrators, inadequate financial administration, and weak internal control mechanisms. This study is expected to serve as an evaluative reference and provide practical recommendations for BUMDes management and village governments in improving sustainable financial management practices.

Keywords: BUMDes, Financial Management, Tekulai Hulu Village

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik dituntut untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan keuangan yang sederhana, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pengurus BUMDes dan aparat pemerintah desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Desa Tekulai Hulu telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman akuntansi pengelola, keterbatasan administrasi keuangan, dan lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan Keuangan, Desa Tekulai Hulu

1. PENDAHULUAN

Village-Owned Enterprises atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang diprakarsai oleh pemerintah desa dengan tujuan memaksimalkan potensi sumber daya desa untuk

Asmarita-Roslina-Susanti-Febrina, Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes didukung oleh regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya, yang menempatkan BUMDes sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan aset desa serta pemanfaatan dana desa untuk kepentingan ekonomi lokal. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan BUMDes menjadi aspek fundamental karena berkaitan langsung dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes. Pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Widodo, dkk., 2025).

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah masyarakat desa dinilai berkontribusi signifikan dalam mewujudkan lima dari delapan belas indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (TPB Desa). Dalam konteks ini, BUMDes berperan sebagai pemicu, penopang, sekaligus aktor utama dalam pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, desa tanpa kesenjangan, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta desa yang dinamis dengan budaya adaptif. Capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan posisi hukum BUMDes sebagai badan hukum yang memiliki legitimasi formal dalam menjalankan kegiatan usaha. Penguatan legalitas BUMDes semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan *legal standing* yang jelas bagi BUMDes untuk mengelola berbagai jenis unit usaha serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, upaya revitalisasi dan pengembangan BUMDes untuk mendukung pencapaian indikator TPB Desa harus diiringi dengan penerapan pengelolaan keuangan yang baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan aktivitas bisnis BUMDes. Aktivitas usaha yang berjalan secara produktif serta keuntungan yang diperoleh akan memberikan dampak optimal terhadap pembangunan desa apabila didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh langsung terhadap pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan desa tanpa kesenjangan, sekaligus memperkuat peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa secara inklusif (Ivan et al., 2022).

Secara teori, pengelolaan keuangan BUMDes mencakup beberapa dimensi penting yaitu: perencanaan keuangan yang matang dan realistis, pencatatan yang akurat sesuai standar akuntansi (SAK ETAP), penyusunan laporan yang transparan, serta akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dana kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini di lapangan belum optimal dan masih menghadapi kendala signifikan. Misalnya, penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada BUMDes di Pulau Jawa menemukan bahwa banyak BUMDes belum sepenuhnya mematuhi standar pelaporan keuangan karena keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya pendampingan teknis, hingga dukungan pemerintah yang belum maksimal (Widodo, dkk., 2025).

Beberapa studi terdahulu yang mengkaji aspek transparansi dan akuntabilitas mengonfirmasi peran krusial keduanya dalam efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Menariknya, temuan di Suralaga menunjukkan bahwa transparansi tidak serta-merta menjamin kualitas pengelolaan jika tidak dibarengi dengan kompetensi SDM yang mumpuni. Di sisi lain, akuntabilitas konsisten menunjukkan dampak signifikan yang mengindikasikan bahwa inti dari tata kelola yang baik terletak pada internalisasi prinsip pertanggungjawaban oleh pengurus, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif formal (Lestari, 2025).

Terdapat anomali kinerja keuangan yang sangat ekstrem pada periode 2022–2024. Laba bersih BUMDes melonjak sebesar 1.200% pada tahun 2023 (dari Rp2,18 juta menjadi Rp28,40 juta), namun anjlok drastis sebesar 66.6% pada tahun 2024 (menjadi Rp9,48 juta). Fluktuasi pendapatan yang dramatis ini terjadi di tengah ekspansi modal besar-besaran (seperti belanja unit Sembako yang mencapai Rp433,10 juta pada 2023) serta tingginya angka piutang macet/*uncollectible* ('Bon Masyarakat' sebesar Rp15,39 juta pada 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakstabilan tata laksana keuangan yang belum pernah dianalisis secara mendalam pada studi BUMDes sebelumnya.

Sejumlah penelitian juga menyoroti tantangan internal lainnya, antara lain kemampuan SDM pengelola BUMDes yang masih rendah dalam memahami prinsip manajemen keuangan, hanya melakukan pencatatan kas sederhana tanpa standar akuntansi, serta rendahnya adopsi teknologi digital untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja usaha BUMDes dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (*PADes*) (Tata et al., 2024).

Studi terdahulu seperti Budi & Kusuma (2023) dan Lestari (2025) berasumsi bahwa kepatuhan administrasi formal dan pertanggungjawaban bertahap otomatis mencerminkan tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Namun, kasus BUMDes "Maju Desaku" membuktikan keterbatasan teori tersebut: lembaga ini secara konsisten menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPD dan DPMD (memenuhi *compliance* formal), tetapi di sisi internal tetap mengalami kegagalan pencatatan berbasis SAK EMKM, kelemahan sistematis pada pengawasan internal, dan ketiadaan transparansi publik kepada masyarakat

desa. Kondisi ini memperlihatkan pemisahan (*decoupling*) antara akuntabilitas administratif formal dan akuntabilitas substantif. Tata kelola BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu diintegrasikan melalui empat pilar utama, yakni perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pelaksanaan operasional, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024

Tahun	Laporan Laba Rugi	Pendapatan Asli Desa (20%)
2022	Rp 2.185.000	Rp 437.000
2023	Rp 28.409.500	Rp 5.681.900
2024	Rp 9.489.000	Rp 1.897.800

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024. Data Diolah

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan BUMDes Desa Tekulai Hulu masih dihadapkan pada sejumlah kendala khususnya pada aspek manajemen keuangan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, penggunaan sistem pembukuan yang masih bersifat sederhana serta lemahnya fungsi pengawasan internal. Situasi ini berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang ideal bagi organisasi tersebut.

Mendorong profesionalisme BUMDes Desa Tekulai Hulu memerlukan langkah nyata melalui pembenahan manajemen keuangan dan peningkatan kapabilitas personel. Restrukturisasi pola pengawasan dan efisiensi administrasi diharapkan menjadi stimulan bagi keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran BUMDes benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tekulai Hulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tujuan esensial BUMDes dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa harus didukung oleh tata kelola keuangan yang kredibel di setiap fasenya. Meskipun banyak BUMDes telah berhasil menjalankan unit usahanya, berbagai studi mengidentifikasi adanya hambatan signifikan dalam keterbukaan informasi dan integritas pelaporan keuangan. Masalah ini, ditambah dengan keterbatasan pemahaman publik terhadap mekanisme keuangan, menegaskan pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan untuk memperkuat posisi BUMDes sebagai pilar ekonomi pedesaan yang berkelanjutan (Angraeni, 2024).

2.1.1 Standar Akuntansi dan Sistem Pelaporan Keuangan

Kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku merupakan pilar utama dalam menjamin validitas laporan keuangan. Namun, observasi terhadap penerapan SAK ETAP pada BUMDes menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan, di mana dokumen fundamental seperti neraca, laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sering kali terabaikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah kompetensi dalam memahami regulasi pelaporan, yang pada akhirnya menghambat terciptanya transparansi finansial yang komprehensif (Laksmi and Amanda, 2025). Selain itu, penelitian lain mengenai SAK EMKM menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi modern dapat meningkatkan kualitas struktur laporan keuangan BUMDes jika dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh pengurusnya. SAK EMKM sendiri menjadi model alternatif praktik akuntansi yang lebih sesuai dengan entitas berskala mikro seperti BUMDes (Perception et al., 2025).

2.1.2 Prinsip Tata Kelola Keuangan BUMDes

Urgensi *financial governance* dalam struktur BUMDes terletak pada penciptaan sistem manajemen keuangan yang kokoh dan mekanisme pengendalian internal yang fungsional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa meskipun aktivitas pembukuan telah berjalan, standarisasinya sering kali belum selaras dengan prinsip tata kelola yang ideal. Penguatan aspek *governance* ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan prasyarat strategis untuk menjamin keberlanjutan unit usaha serta memitigasi risiko guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan desa (Budi and Kusuma, 2023).

2.2 Faktor Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi parameter fundamental dalam mengevaluasi mutu manajemen keuangan BUMDes. Merujuk pada studi empiris di wilayah Suralaga, terbukti bahwa kedua variabel tersebut merupakan determinan signifikan bagi terciptanya pengelolaan keuangan yang berkualitas. Melalui keterbukaan informasi yang optimal, para pemangku kepentingan dapat memonitor kondisi finansial lembaga secara objektif, sementara implementasi akuntabilitas menjamin bahwa seluruh prosedur manajerial senantiasa berpijak pada regulasi dan norma yang berlaku (Lestari, 2025). Selain itu, berbagai kajian menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan tertulis saja tidaklah memadai, melainkan diperlukan implementasi nyata dari pimpinan BUMDes dan jajaran pengelola di lapangan yang secara langsung menentukan baik atau buruknya kualitas pengelolaan keuangan (Utami et al., 2022).

Asmarita-Rosliana-Susanti-Febrina, *Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah*

2.2.1 Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Aspek efektivitas dan efisiensi menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan BUMDes mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana, ketepatan pencatatan, serta pengembangan unit usaha. Penelitian yang dilakukan di Desa Boro dan wilayah sekitarnya menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan telah diupayakan melalui mekanisme musyawarah desa dan penetapan program prioritas, pelaksanaannya masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penggunaan sistem pencatatan yang masih manual, perencanaan keuangan yang belum didasarkan pada analisis kelayakan usaha, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi sistem akuntansi sederhana dan penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus BUMDes sebagai langkah strategis untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang (Wahyuningsih, Hayat, and Zakariah, 2025).

2.2.2 Pengelolaan dan Pembangunan Desa

Relevansi pengelolaan keuangan BUMDes terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa terletak pada integrasi nilai-nilai akuntabilitas dan partisipasi. Praktik manajerial yang terbuka memungkinkan terciptanya distribusi sumber daya yang lebih adil dan tepat sasaran. Dengan melibatkan warga dalam proses pengawasan dan evaluasi finansial, BUMDes dapat memperkuat basis legitimasi sosialnya sekaligus memastikan bahwa setiap langkah ekonomi yang diambil selaras dengan target pembangunan desa yang berkelanjutan (Ivan et al., 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami konteks sosial manajerial dalam tata kelola BUMDes. Fokus penelitian diarahkan pada penggambaran faktual mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan yang sedang berjalan. Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu menjangkau dimensi-dimensi non teknis seperti kapasitas sumber daya manusia dan budaya akuntabilitas organisasi yang memerlukan interpretasi mendalam berdasarkan kondisi aktual di Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah.

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam realitas sosial-manajerial, pemahaman akuntansi pengelola, serta dinamika tata kelola keuangan BUMDes “Maju Desaku” di lapangan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes “Maju Desaku”, Desa Tekulai Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Waktu penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025, mencakup tahap observasi awal, penyusunan instrumen, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

3.2 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek utama studi ini adalah BUMDes Desa Tekulai Hulu, dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Pemilihan partisipan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi peran dan otoritas mereka terhadap manajemen keuangan organisasi. Informan yang ditetapkan untuk memberikan data mendalam meliputi:

1. Direktur atau Ketua BUMDes Desa Tekulai Hulu
2. Sekretaris atau yang Mengatur Jalannya Pengelolaan BUMDes
3. Bendahara atau Pengelola Keuangan BUMDes
4. Aparat Desa yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan atau pembinaan BUMDes

Penetapan informan ini dilakukan secara strategis untuk menjamin perolehan data yang komprehensif serta akurat. Dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan, peneliti dapat melakukan triangulasi data guna memverifikasi praktik pengelolaan keuangan BUMDes melalui berbagai perspektif yang berbeda, sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengombinasikan dua kategori sumber data guna menghasilkan analisis yang utuh.

1. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung untuk menangkap dinamika pengelolaan keuangan serta realitas akuntabilitas di lapangan
2. data sekunder dikumpulkan dari arsip resmi seperti dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban usaha, serta instrumen hukum yang berlaku. Penggunaan data sekunder ini krusial untuk memberikan konteks yuridis dan administratif terhadap temuan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Kriteria Kejenuhan Data (Data Saturation)

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan kendala teknis akuntansi.
2. Observasi Partisipatif: Pengamatan langsung terhadap proses pencatatan transaksi kas harian dan aktivitas operasional unit usaha.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan salinan BKU, Laporan Modal, LPJ 2022–2024, Perdes BUMDes, dan nota/kuitansi.

Kriteria Kejenuhan Data (*Data Saturation*): Pengumpulan data wawancara dihentikan pada informan ke-6 (Tokoh Masyarakat) karena informasi yang diperoleh telah mengalami pengulangan (*redundancy*), tidak ditemukannya lagi kategori atau tema baru terkait mekanisme pengelolaan keuangan, dan seluruh variabel indikator evaluasi SAK EMKM telah terkonfirmasi secara konsisten.

3.5 Proses Analisis Data Wawancara

Analisis data wawancara dan dokumen mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahapan terintegrasi:

1. *Data Collection*: Pengumpulan seluruh transkrip wawancara, catatan lapangan, dan arsip laporan keuangan.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data): Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data. Transkrip wawancara dikategorikan ke dalam kode tema (seperti #Perencanaan, #Pencatatan_Kas, #Kendala_EMKM, #Piutang_Bon).
3. *Data Display* (Penyajian Data): Menyajikan data yang telah dikelompokkan ke dalam matriks naratif dan tabel komparasi antara standar SAK EMKM dengan praktik aktual BUMDes.
4. *Conclusion Drawing / Verification*: Penarikan kesimpulan secara bertahap dan melakukan verifikasi ulang selama penelitian berlangsung.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tekulai Hulu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pembentukan Desa Tekulai Hulu berawal dari berkembangnya permukiman penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdiri secara mandiri. Atas dasar tersebut, masyarakat bersama tokoh adat, tokoh agama, dan para pemuka kampung melakukan musyawarah untuk membentuk sebuah desa yang mampu mengelola serta mengatur kepentingan masyarakat secara lebih efektif dan optimal.

Secara administratif, Desa Tekulai Hulu berada di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada umumnya, desa ini merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi utama di sektor perkebunan kelapa dan pinang, serta budidaya berbagai jenis sayuran di kawasan sekitarnya. Desa Tekulai Hulu tidak memiliki catatan sejarah yang terdokumentasi secara rinci. Pada mulanya, wilayah ini dibuka oleh H. Anton Barham, seorang perantau asal Kalimantan, yang kemudian menamainya Tekulai Hulu karena kampung tersebut hanya dapat dijangkau melalui Kuala Tekulai di bagian hulu sungai, sehingga dikenal sebagai Desa Tekulai Hulu.

Melalui hasil musyawarah masyarakat dan dukungan para tokoh adat, usulan pembentukan desa kemudian diajukan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Setelah melalui proses administrasi dan pertimbangan wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyetujui pembentukan Desa Tekulai Hulu sebagai desa definitif. Sejak saat itu, desa ini memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Desa Tekulai Hulu berkembang menjadi desa dengan struktur sosial dan ekonomi yang lebih tertata. Penduduknya terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Desa ini terus mengalami perkembangan baik dari sisi sarana prasarana maupun tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku.

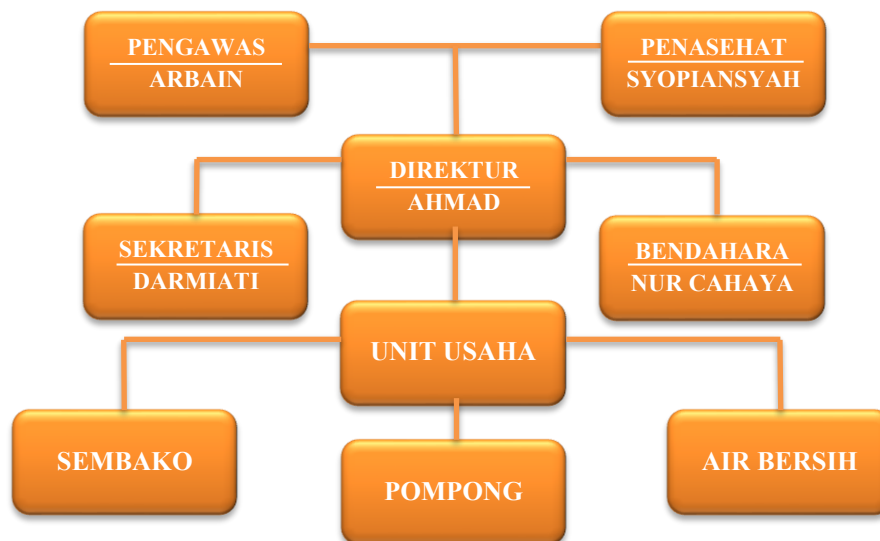
Desa Tekulai Hulu memiliki jarak yang relatif dekat dari ibu kota kecamatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan cukup mudah. Selain itu, kedekatan jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten turut mendukung aktivitas administrasi dan koordinasi pembangunan desa. Dengan latar belakang sejarah tersebut, Desa Tekulai Hulu terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam kerangka pembangunan desa, Desa Tekulai Hulu secara berkelanjutan mengarahkan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang lebih optimal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan unit-unit usaha ekonomi desa. Kondisi ini menjadikan pengelolaan keuangan BUMDes sebagai elemen krusial yang perlu dianalisis secara komprehensif untuk menjamin bahwa aktivitas usaha desa berjalan secara efektif, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Tekulai Hulu.

4.2 Struktur Organisasi BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah

Tata organisasi Pemerintahan Desa Tekulai Hulu dibentuk dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dalam kerangka kelembagaan tersebut, Kepala Desa bersama jajaran perangkat desa berfungsi sebagai unsur pimpinan yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa berada di bawah koordinasi Sekretaris Desa yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan administrasi pemerintahan serta mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa pada bidang ketatausahaan, urusan umum, dan pengelolaan keuangan, serta berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis menjalankan tugas teknis sesuai bidangnya. Sementara itu, Pelaksana Kewilayahan, termasuk kepala dusun membantu pelaksanaan pemerintahan di wilayah masing-masing. Struktur organisasi ini dirancang untuk menjamin pembagian tanggung jawab yang jelas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan guna menjamin terselenggaranya fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan kemasayarakatan, serta pemberdayaan masyarakat secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah



4.3 Analisis Perencanaan Keuangan BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu

Tahapan awal dalam pengelolaan badan usaha diawali dengan proses perencanaan. Di BUMDes Desa Tekulai Hulu, perencanaan dilakukan pada fase awal setelah lembaga tersebut dibentuk serta ketika memperoleh dukungan pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak eksternal. Apabila tidak terdapat alokasi dana, kegiatan perencanaan umumnya tidak dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan oleh pengurus BUMDes melalui forum rapat bersama yang dikenal sebagai musyawarah desa. Selain itu, perencanaan juga disusun melalui koordinasi dengan pengurus pada masing-masing unit usaha dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan tersebut diarahkan untuk menetapkan jenis kegiatan yang akan dijalankan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta estimasi anggaran yang diperlukan dalam periode satu tahun anggaran.

Berikut merupakan laporan modal yang digunakan oleh BUMDes Desa Tekulai Hulu :

Tabel 4.1 Laporan Modal BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024

Sumur Bor			
Aktiva	2022	Tahun Berjalan	
		2023	2024
Persediaan Barang (Modal)	-	Rp. 45.570.000	Rp. 23.423.130
Pipa 2 inc (Rucika)	-	Rp. 18.750.000	Rp. 16.125.000
Pipa T 2x ½ inc	-	Rp. 1.500.000	Rp. 1.403.000
Pipa T 2 inc	-	Rp. 300.000	Rp. 300.000
Stop Kran ½ inc	-	Rp. 2.500.000	Rp. 1.050.000

Aktiva	Tahun Berjalan		
	2022	2023	2024
Pipa L 2 inc	-	Rp. 200.000	Rp. 200.000
Soket 2 inc	-	Rp. 200.000	Rp. 200.000
Lem Botol	-	Rp. 100.000	Rp. 80.000
Lem Kaleng	-	Rp. 350.000	Rp. 140.000
Pipa ½ inc	-	Rp. 150.000	Rp. 360.000
Pipa 2 inc	-	Rp. 1.425.000	Rp. 675.000
Jasa Pasang Pipa	-	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
Jasa ABK	-	Rp. 500.000	-
Sewa Pompong	-	Rp. 1.200.000	Rp. 700.000
Kabel	-	Rp. 200.000	Rp. 100.000
Mesin Otomatis	-	Rp. 200.000	Rp. 100.000
Jasa Bongkar Pipa	-	Rp. 200.000	-
Jumlah	-	Rp. 30.275.000	Rp. 23.933.000

Sumber: Laporan Modal BUMDes Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024. Data Diolah

Tabel 4.2 Laporan Modal BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024
Pompong

Aktiva	Tahun Berjalan		
	2022	2023	2024
Persediaan Barang (Modal)	Rp. 57.000.000	-	-
Pompong	Rp. 26.000.000	-	-
Mesin	Rp. 7.500.000	-	-
Oli Mesin	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
Oli Sel	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
T. Glar	Rp. 60.000	-	-
Klahar	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
Oli Glar	Rp. 162.000	-	-
Baut 3/8 5500 (20 box)	Rp. 50.000	-	-
Mor 3/8 (1 m)	Rp. 30.000	-	-
Tali Balting	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Selang Kawat	Rp. 30.000	-	-
Minyak Solar	Rp. 200.000	Rp. 2.467.000	Rp. 490.000
Ojek Bawa Mesin	Rp. 250.000	-	-
Upah Angkut	Rp. 150.000	-	-
Bayar Tempat Usaha	Rp. 6.000.000	-	-
Operasional BUMDes	Rp. 1.500.000	-	-
Minyak Viber	Rp. 195.000	-	-
Terpal	Rp. 280.000	-	-
Kain Viber	Rp. 60.000	-	-
Glat Box	Rp. 3.100.000	-	-
Papan Pompong	Rp. 285.000	-	-
Kipas Pomponng	Rp. 2.300.000	-	-
Pasang Mesin & Perlengkapan	Rp. 2.200.000	-	-
Terpal 4x6	Rp. 150.000	-	-
Mata Bor	Rp. 75.000	-	-
Sambungan Rolian	Rp. 20.000	Rp. 4.839.000	Rp. 355.800
Upah ABK	-	-	-
Paku	Rp. 15.000	-	-
Kertas F4	Rp. 58.000	-	-
Jumlah	Rp. 50.950.000	Rp. 7.696.000	Rp. 1.240.000

Sumber: Laporan Modal BUMDes Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024. Data Diolah

Tabel 4.3 Laporan Modal BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024

Sembako			
Aktiva	Tahun Berjalan		
	2022	2023	2024
Persediaan Barang (Modal)	Rp. 270.400.000	-	-
Pembuatan Jembatan Kayu 3,7 x 8m	Rp. 5.700.000	-	-
Kulkas	Rp. 3.650.000	-	-
Lemari Jualan	Rp. 4.600.000	-	-
Angkong	Rp. 650.000	-	-
Bola Lampu	Rp. 210.000	Rp. 100.000	Rp. 75.000
Kabel	Rp. 132.000	-	-
Putting Lampu	Rp. 35.000	-	-
Swis	Rp. 30.000	-	-
Terminal	Rp. 45.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000
Laptop	-	-	Rp. 12.000.000
Printer Epson	-	-	Rp. 2.500.000
Sewa Toko	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Dana Tak Terduga	Rp. 10.000.000	-	-
Upah ABK	Rp. 200.000	Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000
Upah Buruh Barang	Rp. 100.000	Rp. 2.200.000	Rp. 2.000.000
Upah Jalan Direktur	Rp. 200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.200.000
Belanja Barang Serba	Rp. 19.217.000	Rp. 413.409.000	Rp. 165.983.000
		6 Bulan	6 Bulan
Bon Masyarakat	-	-	Rp. 15.394.000
Kertas F4	Rp. 240.000	Rp. 120.000	Rp. 240.000
Kertas A4	Rp. 220.000	Rp. 110.000	Rp. 220.000
Tinta Printer	-	-	Rp. 400.000
Cartar Pompong	Rp. 600.000	Rp. 7.500.00	Rp. 10.000.000
Jumlah	Rp. 50.739.000	Rp. 433.104.000	Rp. 218.382.000

Sumber: Laporan Modal BUMDes Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024. Data Diolah

4.4 Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah

Pertanggungjawaban merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang diamanahkan kepada pengurus BUMDes “Maju Desaku”. Mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan dilakukan melalui penyampaian laporan resmi kepada Badan Permusyawaratan Desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen pertanggungjawaban yang disusun mencakup Neraca Saldo, Laporan Laba Rugi, Daftar Persediaan, Daftar Aset beserta penyusunannya, Laporan Operasional, serta bukti transaksi berupa nota pembelian, struk pembayaran, dan dokumentasi jenis barang. Seluruh laporan tersebut dilengkapi dengan salinan bukti pembelian dan dokumen pendukung lainnya. Proses pertanggungjawaban ini dilaksanakan secara konsisten oleh BUMDes “Maju Desaku” termasuk pada periode ketika tidak terdapat pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal.

4.5 Pengawasan Keuangan BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah

Mekanisme pengawasan terhadap BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kegiatan pemantauan langsung di lapangan pada saat program atau aktivitas usaha berlangsung yang disertai dengan dokumentasi resmi. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama karena keterlibatan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang masih relatif rendah. Masyarakat cenderung belum aktif mengambil peran dalam mengawasi maupun terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus BUMDes. Padahal, pengawasan merupakan elemen krusial untuk menjamin pengelolaan keuangan BUMDes Desa Tekulai Hulu berlangsung secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam hal ini, BPD Desa Tekulai Hulu memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pengurus BUMDes, khususnya melalui evaluasi dan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Ketua BUMDes, agar pelaksanaan program tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Penelitian mengenai pengelolaan dana di BUMDes “Maju Desaku” di Desa Tekulai Hulu dirangkum dalam tabel berikut. Proses penulisan ini mengintegrasikan panduan dari Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dan diselaraskan dengan aturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 sebagai landasan yuridis utama terkait keuangan desa.

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes “Maju Desaku” Desa Tekulai Hulu

Tahapan Pengelolaan	Kategori	Indikator	Keterangan
Perencanaan	Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Melakukan perencanaan berdasarkan musyawarah pengurus.	Sesuai , namun perlu penguatan analisis kelayakan usaha.
Pelaksanaan	Penggunaan dana sesuai pos anggaran dan prosedur pencairan dana.	Penggunaan dana dilakukan untuk unit usaha aktif.	Sesuai , didukung bukti pembelian (nota/struk).
Penatausahaan	Pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu.	Pencatatan dilakukan secara manual oleh bendahara.	Sesuai secara substansi , namun rentan kesalahan input.
Pelaporan	Penyusunan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan perkembangan usaha berkala.	Menyusun Neraca Saldo, Laba Rugi, Daftar Aset, dan Persediaan.	Cukup Sesuai , perlu penyesuaian dengan SAK ETAP/EP.
Pertanggungjawaban	Penyampaian laporan kepada Komisaris (Kades) dan BPD melalui Musyawarah Desa.	Melaporkan ke BPD dan DPMD Inhil (tetap dilakukan meski tanpa dana luar).	Sangat Sesuai , menunjukkan integritas pengelola.

Sumber: BUMDes Desa Tekulai Hulu Tahun 2022-2024. Data Diolah

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Tekulai Hulu telah memenuhi fungsinya sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup warga. Praktik pengelolaan keuangannya telah mencakup seluruh spektrum manajerial, dari tahap perencanaan awal hingga pertanggungjawaban akhir. Di bawah pembinaan pemerintah desa, pengurus BUMDes berhasil menjalankan tata laksana keuangan yang komprehensif untuk mendukung keberlangsungan pembangunan di wilayah tersebut. Prinsip partisipasi publik telah diimplementasikan oleh BUMDes Desa Tekulai Hulu dalam menyusun perencanaan keuangan melalui pelibatan berbagai elemen desa. Kendati demikian, aspek teknis perencanaan tersebut masih memiliki celah, di mana penyusunannya belum didasarkan pada analisis pasar yang kuat serta perencanaan anggaran yang visioner. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan finansial organisasi masih terbatas pada operasional jangka pendek.

Pada aspek operasional dan tata usaha finansial, BUMDes Desa Tekulai Hulu telah mendokumentasikan setiap aktivitas transaksi yang berlangsung. Namun, metodologi pencatatan yang diimplementasikan masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) yang relevan bagi BUMDes. Hal ini menyebabkan output informasi finansial menjadi kurang komprehensif sehingga sulit untuk mengevaluasi stabilitas serta prospek keberlanjutan bisnis secara presisi. Pemerintah desa telah menerima laporan pertanggungjawaban modal dari pengelola BUMDes Desa Tekulai Hulu, namun prinsip transparansi publik belum sepenuhnya terwujud. Laporan yang ada belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga pengawasan kolektif terhadap pengelolaan dana tersebut masih sangat minim. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih inklusif agar masyarakat dapat memantau perkembangan usaha desa secara langsung.

Secara umum, pengelolaan keuangan BUMDes Desa Tekulai Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan khususnya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman memadai di bidang akuntansi dan tata kelola keuangan, belum kuatnya mekanisme pengawasan internal, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang belum berjalan secara optimal. Kendati demikian, BUMDes Desa Tekulai Hulu memiliki peluang pengembangan yang cukup besar apabila dilakukan upaya pembenahan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola BUMDes

Pengurus BUMDes Desa Tekulai Hulu diharapkan mampu melakukan peningkatan mutu tata kelola keuangan melalui penerapan sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis

Asmarita-Roslina-Susanti-Febrina, Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah

serta selaras dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BUMDes. Selain itu, pengelola perlu memperoleh pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan, dan perencanaan usaha, sehingga pengelolaan BUMDes dapat dijalankan secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

2. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Tekulai Hulu diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, terutama yang berkaitan dengan tata kelola keuangan. Pemerintah desa perlu mendorong keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat melalui penyajian laporan keuangan secara transparan, baik dalam forum musyawarah desa maupun melalui sarana informasi desa. Di samping itu, penyediaan dukungan kebijakan serta fasilitas yang memadai dari pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kinerja dan keberlanjutan BUMDes.
3. Bagi Masyarakat Desa
Demi mewujudkan manajemen BUMDes yang kredibel, masyarakat Desa Tekulai Hulu diharapkan mampu memposisikan diri sebagai mitra sekaligus pengawas. Ruang partisipasi warga harus diperluas tidak hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam memantau arus keuangan dan mengevaluasi hasil usaha. Pendekatan inklusif ini merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem bisnis desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya
Agenda riset di masa depan sebaiknya diarahkan pada pengujian model pengelolaan keuangan BUMDes dengan instrumen metodologi yang lebih variatif. Dengan membandingkan beberapa kasus BUMDes di lokasi yang berbeda, peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi pola manajemen yang paling efektif berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Langkah ini sangat krusial untuk menghasilkan solusi manajerial yang komprehensif dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi pedesaan

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, N. (2024). 1, 2, 3, 4. 9(2), 110–131.
- Budi, R., & Kusuma, B. (2023). Financial governance and internal control system overview in pioneer village-owned enterprises. 7, 18–20.
- Ivan, M., Wibowo, S., Nugrahesthy, A., & Hapsari, S. (2022). Pengelolaan keuangan BUMDes: Upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. 9(1).
- Laksmi, A. C., & Amanda, D. T. (2025). The application of financial accounting standards for entities without public accountability (SAK ETAP) in BUMDes MM. 3(43), 443–453.
- Lestari, T. F. (2025). The influence of transparency and accountability on the financial management of village-owned enterprises (BUMDes) in Suralaga Subdistrict. 9(1), 228–240.
- Perception, A. O. F., Practice, O. F., Implementation, O. F., Emkm, I. N., Preparation, O. F., Financial Reports, O. F. B., & Penambangan Village. (2025). Analysis of perception and practice of implementation of SAK EMKM in preparation of financial reports of BUMDes Karya Abadi, Penambangan Village, Balongbendo. 5(2), 1692–1710.
- Tata, P., Kelola Keuangan, Badan Usaha, & Milik Desa. (2024). Strengthening financial governance of village-owned enterprises Sumber Arto based on private entity financial accounting standards. *Warta Pengabdian Andalas*, 31(2), 243–255.
- Utami, I., Nugrahesthy, A., Hapsari, S., Yakobus, Y., & Kean, W. (2022). Leadership in realizing financial management accountability for village-owned enterprises. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 99–112. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1>
- Wahyuningsih, R., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Boro Kecamatan Sanggar. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 630–640.
- Widodo, S., Sari, M. K., & Handono, W. D. (2025). Strategi transformasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Kompertemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 23(1).